



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Analisis Keberhasilan Petisi *Online* dalam Merubah
Keputusan**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Oleh

Shanty Febriyanti Panca Putri

2016310023

Bandung

2020



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Analisis Keberhasilan Petisi *Online* dalam Merubah
Keputusan**

Skripsi

Oleh

Shanty Febriyanti Panca Putri

2016310023

Pembimbing

Tutik Rachmawati, Ph.D

Bandung

2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Administrasi Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Shanty Febriyanti Panca Putri
Nomor Pokok : 2016310023
Judul : Analisis Keberhasilan Petisi *Online* dalam Merubah Keputusan

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Kamis, 30 Juli 2020
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

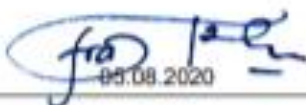
Ketua sidang merangkap anggota

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

: 

Sekretaris

Tutik Rachmawati, Ph.D

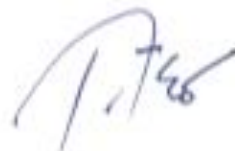
: 
03.08.2020

Anggota

Deny M. Tri Aryadi, Drs., M.Si

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

Pernyataan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Shanty Febriyanti Panca Putri
NPM : 2016310023
Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Analisis Keberhasilan Petisi *Online* dalam Perubahan Kebijakan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip dan ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 23 Juli 2020



Shanty Febriyanti Panca Putri

Lembar Plagiarisme

Shanty Febriyanti_Cek Plagiarisme Skripsi Bab 1-6

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul “Analisis Keberhasilan Petisi *Online* dalam Merubah Keputusan” dengan baik.

Karya ilmiah ini diajukan untuk memenuhi syarat pencapaian gelar Sarjana Administrasi Publik dalam jenjang pendidikan Program Studi Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.

Penulisan karya ilmiah ini terwujud dengan adanya dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini peneliti akan menyampaikan ucapan terimakasih. Pertama, penulis ucapkan terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu memberikan segala karunia-Nya. Kedua, orangtua penulis Bapak Bambang Basoeki dan Mamah Euis Kusmiati yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan semangat yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.

Tidak lupa penulis sampaikan terimakasih kepada dosen pembimbing, yaitu Ibu Tutik Rachmawati, Ph.D yang telah meluangkan begitu banyak waktu untuk membimbing, selalu sabar menjelaskan dan memberikan masukan baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, selalu memotivasi dan menginspirasi penulis, serta selalu memberikan dorongan semangat yang tiada henti sehingga penulis mampu menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan baik dan benar. Peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.
2. Bapak Trisno Sakti Herwanto, S.I.P., MPA. selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.
3. Ibu Susana Ani Berlianti, Ibu Gina Ningsih Yuwono, Ibu Indraswari, Ibu Maria, Bapak Deny, Bapak Pius Suratman, Bapak Ulber Silalahi, Bapak Dudung Sumahdumin, Bapak Meindy Mursal, Mas Kristian, Bapak Hubertus dan segenap Dosen Pengajar yang telah memberikan pembelajaran kepada penulis selama berada di Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.
4. Kakak Tercinta Santosa, Syahid Zuhdi, Suryadi, Alfa Diyaksa atas doa dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis.
5. Teman terdekat B. Erfransyah Levi Darmawan atas segala doa, bantuan, dan dorongan semangat yang tiada henti kepada penulis.
6. Adik – adik di Rumah. Elangshaa yang selalu menyemangati dan mendoakan penulis.
7. Keluarga di UKM KORGALA, khususnya Kak Gugie dan Bang Ujan, serta anggota angkatan Pelindung Purnama yang senantiasa memberikan semangat, menghibur, memberikan pengalaman, memotivasi, dan memberikan dukungan kepada penulis.

8. Sahabat terdekat, Hasna, Uli, Hani, Ega, Ijal, Febi, Abyan, Sani, dan Roni yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis.
9. Laras Ambarsari, Su, Caroline Pratiwi, Fadhlán, dan Indah selaku teman seperjuangan yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Administrasi Publik.
10. Teman – teman Administrasi Publik angkatan 2015,2016, dan 2017 juga teman – teman FISIP UNPAR atas dukungan, pengalaman yang sangat berharga, dan kerjasamanya selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan.
11. Terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang selalu menemani dan memberikan dukungan kepada penulis.

Penulus menyadari bahwa dalam karya tulis ilmiah ini masih memiliki banyak kekurangan. Maka dari itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun dari para pembaca demi terlaksananya penelitian yang lebih baik dan tujuan dari penelitian ini dapat terwujud. Akhir kata, peneliti berharap karya ilmiah ini akan bermanfaat bagi semua pihak.

Bandung, 23 Juli 2020

Penulis

Shanty Febriyanti Panca Putri

ABSTRAK

Nama : Shanty Febriyanti Panca Putri

NPM : 2016310023

Judul : Analisis Keberhasilan Petisi *Online* dalam Merubah Keputusan

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa Keberhasilan Petisi *Online* dalam Merubah Keputusan dengan menggunakan indikator keberhasilan petisi *online* menurut A.J.Nowness (2006), S.Wright (2016), dan Zahariadis (2016). Indikator keberhasilan petisi *online*, yaitu : (1) isu yang dipetisikan mendesak dan tidak bertentangan dengan opini publik (2) diketahui oleh masyarakat luas (3) menyajikan fakta yang kredibel (4) petisi tidak menuntut terlalu banyak perubahan (5) kuantitas dukungan. Kemudian, keberhasilan perubahan keputusan dianalisa menggunakan konsep dari Mahon (2008), yaitu : (1) *ultimately effective*, (2) *intermediately effective*.

Melalui pendekatan kualitatif, peneliti melakukan analisa terhadap keberhasilan petisi *online* dalam merubah keputusan. Peneliti juga menggunakan data-data sekunder, berupa 60 petisi kemenangan yang ada di laman Change.Org pada tahun 2012-2019. Pengumpulan data, analisa, dan kredibilitas temuan dilakukan menggunakan konsep triangulasi oleh Moleong (2018) yaitu triangulasi sumber data.

Petisi *online* telah berhasil merubah keputusan pada tingkat *ultimately effective* karena telah memenuhi indikator keberhasilan petisi *online*, yaitu (1) adanya isu yang mendesak dan tidak bertentangan dengan opini publik, (2) diketahui oleh masyarakat luas, (3) menyajikan fakta yang kredibel, (4) tidak menuntut banyak perubahan, dan (5) adanya kuantitas dukungan.

Kata Kunci : Petisi *Online*, Keberhasilan Petisi *Online*, Perubahan Keputusan, *Public Affairs*

ABSTRACT

Name : Shanty Febriyanti Panca Putri

NPM : 2016310023

Title : Analysis of Online Petition Success in Changing Decisions

This research aims to conduct an analysis of online petition success in changing decisions by using online petitions success indicators according to A.J.Nowness (2006), S.Wright (2016), Zahariadis (2016). Indicators of the success of online petitions, namely: (1) issues on the petition is urgent and do not conflict with public opinion (2) known by the society (3) present credible facts (4) petitions do not demand too many changes (5) support quantity. Then, the success of policy changes is analyzed using the concept from Mahon (2008), namely: (1) ultimately effective, (2) intermediately effective.

The design of this research is qualitative. This research use secondary data, consists of 60 petitions victory from 2012-2019 on Change.Org. Data collection, analysis, and credibility of the findings are carried out using the concept of triangulation by Moleong (2018), that is data sources triangulation.

Online petitions have succeeded in changing decisions at an ultimately effective level. This is because, it has met the success indicators of online petitions, namely (1) the existence of urgent issues that do not conflict with public opinion, (2) known to the society, (3) presents credible facts, (4) does not demand a lot of changes, and (5) has a quantity of support.

Keywords: *Online Petition, Successful Online Petition, Decisions Changes, Public Affairs*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR DIAGRAM.....	xi
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.4.1 Manfaat Teoritis	11
1.4.2 Manfaat Praktis.....	12
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II.....	14
2.1 Definisi Kebijakan.....	14
2.2 Definisi Kebijakan Publik.....	15
2.3 Proses Kebijakan Publik	15
2.3 Formulasi Kebijakan.....	17
2.3.1 Aktor dalam Formulasi Kebijakan.....	17
2.4 Opini Publik	18
2.5 Public Affairs	19
2.6 Petisi.....	21
2.7 Petisi <i>Online</i>	22
2.7.1 Definisi Petisi <i>Online</i>	22
2.7.2 Tipe Petisi <i>Online</i>	24
2.7.3 Fungsi Petisi <i>Online</i>	25

2.8 Konsep Keberhasilan Petisi <i>Online</i>	26
2.8.1 <i>Lobbying</i>	26
2.8.2 Agenda Setting	32
2.9 Perubahan Keputusan	36
2.10 Model Penelitian.....	39
BAB III	40
3.1 Tipe Penelitian	40
3.2 Lokasi Penelitian.....	41
3.3 Operasional Variabel.....	41
3.4 Sumber Data	43
3.4.1 Data Sekunder	43
3.5 Teknik Pengumpulan data	43
3.5.1 Dokumen.....	44
3.6 Analisis Data.....	45
3.7 Validitas Data	48
3.7.1 Triangulasi.....	48
BAB IV	50
4.1 Change.Org.....	50
4.2 Cara Menggunakan Change.Org	53
4.3 Petisi Online tentang <i>Public Affairs</i>	62
BAB V	64
5.1 Isu yang Dipetisikan Mendesak dan Tidak Bertentangan dengan Opini Publik	64
5.2 Petisi <i>Online</i> yang Diketahui Masyarakat Luas	84
5.3 Petisi <i>Online</i> yang Menyajikan Fakta Kredibel	91
5.4 Petisi <i>Online</i> Tidak Menuntut Banyak Perubahan	103
5.5 Kuantitas Dukungan.....	109
5.6 Perubahan Keputusan.....	121
BAB VI	131
6.1 Isu yang Dipetisikan Mendesak dan Tidak Bertentangan dengan Opini Publik ...	131

6.2 Petisi <i>Online</i> yang Diketahui Masyarakat Luas	135
6.3 Petisi <i>Online</i> yang Menyajikan Fakta Kredibel	137
6.4 Petisi <i>Online</i> Tidak Menuntut Banyak Perubahan	139
6.5 Kuantitas Dukungan	140
6.6 Keberhasilan Petisi <i>Online</i> dalam Merubah Keputusan	142
BAB VII	147
7.1 Kesimpulan	147
7.2 Saran.....	149
DAFTAR PUSTAKA	150
LAMPIRAN	156

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Pengguna Internet di Indonesia Tahun 2012-2019.....	7
Tabel 3. 1 Operasional Variabel	42
Tabel 4. 1 Jumlah Petisi di Change.Org Tahun 2012-2019.....	53
Tabel 4. 2 Jumlah Petisi Kategori <i>Public Affairs</i> Tahun 2012-2019.....	62
Tabel 5. 1 Jumlah yang Menandatangani Petisi <i>Online</i> Kategori “Kemakmuran Bersama” untuk Penerima Petisi <i>Online</i> Tahun 2012-2019	65
Tabel 5. 2 Jumlah yang Menandatangani Petisi <i>Online</i> Kategori “Keadilan Sosial” untuk Penerima Petisi <i>Online</i> Tahun 2012-2019	69
Tabel 5. 3 Jumlah Deskripsi Komentar yang Ada pada Petisi <i>Online</i> Tahun 2012-2019 ..	75
Tabel 5. 4 Daftar Kategori Komentar pada Petisi <i>Online</i> Tahun 2012 – 2019.....	79
Tabel 5. 5 Total <i>View</i> Petisi <i>Online</i> Kategori “Kemakmuran Bersama” yang Berhasil Mendapat Kemenangan Tahun 2012-2019.....	84
Tabel 5. 6 Total <i>View</i> Petisi <i>Online</i> Kategori “Keadilan Sosial” yang Berhasil Mendapat Kemenangan Tahun 2012-2019.....	85
Tabel 5. 7 Total <i>Sharing</i> Petisi <i>Online</i> Kategori “Kemakmuran Bersama” kepada Masyarakat Luas Tahun 2012-2019.....	87
Tabel 5. 8 Total <i>Sharing</i> Petisi <i>Online</i> Kategori “Keadilan Sosial” kepada Masyarakat Luas Tahun 2012-2019.....	88
Tabel 5. 9 Petisi <i>Online</i> yang Menyajikan Fakta Kredibel Tahun 2012-2019	91
Tabel 5. 10 Tuntutan dalam Petisi <i>Online</i> Tahun 2012-2019	103
Tabel 5. 11 Kuantitas Tandatangan Petisi <i>Online</i> Kategori “Kemakmuran Bersama” Tahun 2012-2019	110
Tabel 5. 12 Kuantitas Tandatangan Petisi <i>Online</i> Kategori “Keadilan Sosial” Tahun 2012- 2019.....	111
Tabel 5. 13 Dukungan dari Komunitas/Lembaga dan Perorangan Terhadap Petisi <i>Online</i> Kategori “Kemakmuran Bersama” Tahun 2012-2019	114
Tabel 5. 14 Dukungan Dukungan dari Komunitas/Lembaga dan Perorangan Terhadap Petisi <i>Online</i> Kategori “Keadilan” Tahun 2012-2019.....	115
Tabel 5. 15 Perubahan Keputusan pada Tahun 2012-2019	122
Tabel 6. 1 Jumlah Tandatangan Keseluruhan pada Petisi <i>Online</i> tentang <i>Public Affairs</i> Tahun 2012-2019	132
Tabel 6. 2 Jumlah Tandatangan Berdasarkan Kategori Petisi tentang <i>Public Affairs</i> Tahun 2012-2019.....	133
Tabel 6. 3 Jumlah <i>View</i> Berdasarkan Kategori Petisi tentang <i>Public Affairs</i> Tahun 2012- 2019.....	135
Tabel 6. 4 Jumlah <i>Sharing</i> Berdasarkan Kategori Petisi tentang <i>Public Affairs</i> Tahun 2012-2019.....	136
Tabel 6. 5 Perbandingan Jumlah <i>View</i> dan <i>Sharing</i> pada Petisi <i>Online</i> Kategori <i>Public</i> <i>Affairs</i> Tahun 2012-2019.....	136
Tabel 6. 6 Jumlah Tandatangan pada Petisi <i>Online</i> Tahun 2012-2019.....	141

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Tampilan Laman https://petisi-change-org.com/	47
Gambar 4. 1 Tampilan Laman Change.Org.....	50
Gambar 4. 2 Tampilan Daftar atau <i>Log In</i> pada Laman Change.Org	54
Gambar 4. 3 Tampilan untuk Memulai Petisi di Laman Change.Org.....	54
Gambar 4. 4 Tampilan untuk Memilih Isu Petisi di Change.Org	55
Gambar 4. 5 Tampilan untuk Menulis Judul Petisi di Change.Org	55
Gambar 4. 6 Tampilan untuk Memilih Penerima Petisi pada Laman Change.Org	56
Gambar 4. 7 Tampilan untuk Menjelaskan Permasalahan	56
Gambar 4. 8 Tampilan untuk Menambah Foto atau Video pada Laman Change.Org	57
Gambar 4. 9 Tampilan untuk Menyimpan Unggahan Foto atau Video pada Laman Change.Org.....	57
Gambar 4. 10 Tampilan untuk Menerbitkan Petisi di Laman Change.Org	58
Gambar 4. 11 Tampilan untuk Menyebarkan Petisi.....	58
Gambar 4. 12 Tampilan untuk Memantau Perkembangan Petisi yang Dibuat pada Laman Change.Org.....	59
Gambar 4. 13 Tampilan untuk Mengembangkan Petisi yang Dibuat pada Laman Change.Org.....	60
Gambar 4. 14 Tampilan Daftar Penandatanganan pada Petisi yang Dibuat pada Laman Change.Org.....	61
Gambar 4. 15 Tampilan untuk Mengelola Petisi pada Laman Change.Org	61

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 4. 1 Jumlah Petisi <i>Online</i> Tentang <i>Public Affairs</i> Tahun 2012-2019	63
Diagram 5. 1 Kategori Komentar pada Petisi <i>Online</i> Tahun 2012-2019	83
Diagram 5. 2 Jumlah Dukungan dari Komunitas/Lembaga dan Perorangan Terhadap Petisi <i>Online</i> Tahun 2012-2019	121
Diagram 6. 1 Jumlah Tuntutan yang ada di Petisi Kemenangan Tahun 2012-2019	139
Diagram 6. 2 Jumlah Petisi Kemenangan Berdasarkan Kategori <i>Public Affairs</i> Tahun 2012-2019.....	143
Diagram 6. 3 Jumlah Perubahan Kebijakan yang Terwujud Tahun 2012-2019	144

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Dye¹, “*public policy is whatever governments choose to do or not to do.*” Artinya, kebijakan publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Salah satu yang dilakukan pemerintah adalah mengambil tindakan atau tidak mengenai permasalahan yang berorientasi pada *public affairs* atau urusan publik.

Menurut Windsor², *public affairs* atau urusan publik adalah hal yang terorganisir dan berhubungan dengan perusahaan, pemerintah (urusan pemerintah dan kebijakan publik), dan media (hubungan masyarakat). Itu artinya, permasalahan yang terjadi adalah permasalahan yang memang dianggap penting oleh publik dan melibatkan aktor-aktor yang berkepentingan.

Berdasarkan makna dari kebijakan publik, maka, kebijakan publik dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah atau isu publik yang terjadi dan kebijakan publik akan berhasil jika manfaatnya bisa dirasakan oleh publik. Artinya, kebijakan publik memiliki peran yang besar karena berhubungan dengan keinginan publik.

¹ T.R.Dye, *Understanding Public Policy* (New Jersey:Prentice-Hall,Inc.,1992) 2.

² D.Windsor, ‘Public affairs, issues management, and political strategy: Opportunities, obstacles, and caveats’ *Journal of Public Affairs*, Volume 1 Number 1 (2001) : 383

Namun, pada faktanya masih ada kebijakan yang dianggap belum bisa menyelesaikan permasalahan publik yang terjadi. Hal tersebut terjadi karena di satu sisi kebijakan publik yang dibuat memberikan manfaat pada sebagian masyarakat dan di sisi lain justru tidak memberikan manfaat atau bahkan merugikan sebagian masyarakat yang lainnya. Contoh kebijakan publik yang dianggap belum sesuai dalam menyelesaikan permasalahan adalah diterbitkannya Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 mengenai Tenaga Kerja Asing yang justru dianggap merugikan masyarakat Indonesia karena akan mengancam peluang masyarakat Indonesia dalam mencari pekerjaan.³ Walaupun di dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa tenaga kerja asal Indonesia lebih diutamakan, namun tenaga kerja lokal yang berarti tenaga kerja asal Indonesia tetap merasa terancam dalam mencari pekerjaan. Salah satu dampak yang dikhawatirkan oleh tenaga kerja lokal adalah arus kedatangan pekerja asing ke Indonesia menjadi deras⁴. Artinya, semakin banyak pekerja asing yang datang ke Indonesia untuk mencari pekerjaan sehingga persaingan untuk mendapatkan pekerjaan akan semakin ketat dan tenaga kerja lokal akan merasa hak untuk mendapatkan pekerjaan semakin tidak dilindungi oleh pemerintah. Selain itu, ada juga UU Nomor 2 Tahun 2018 mengenai Perubahan Kedua atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD yang dinilai oleh kalangan dari LSM justru mengancam kebebasan dalam berpendapat dan bisa berpotensi membungkam kritik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat, seperti pada pasal 73

³H.Putra, 'Tujuh Kebijakan Jokowi-JK Ini Dinilai Rugikan Buruh Indonesia' <https://wartakota.tribunnews.com/2018/04/30/tujuh-kebijakan-jokowi-jk-ini-dinilai-rugikan-buruh-indonesia?page=3>. (6 Agustus 2019)

⁴Y.Satria, 'Pro Kontra Perpres Tenaga Kerja Asing' <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/30/103600226/pro-kontra-perpres-tenaga-kerja-asing?page=all> (6 Agustus 2019)

tentang pemanggilan paksa, pasal 122 tentang penghinaan terhadap parlemen, dan pasal 245 tentang hak imunitas DPR.⁵ Dalam hal ini, hak kebebasan untuk berpendapat dianggap terancam dengan adanya kebijakan tersebut.

Membuat kebijakan tidaklah mudah. Sebab, setiap orang memiliki kepentingan, kebutuhan dan pandangan yang berbeda mengenai apa yang terjadi. Sehingga, kebijakan publik akan selalu menimbulkan pro dan kontra pada saat penetapan dan pelaksanaannya.

Di sisi lain, masih adanya kebijakan publik yang justru dianggap merugikan publik bisa menimbulkan pemikiran bahwa kebijakan yang dibuat oleh pembuat kebijakan lebih mengutamakan masukan dari opini para elit politik atau pihak kepentingan dibandingkan dengan masukan dari opini publik. Dye⁶ mengatakan bahwa pada pelaksanaan pembuatan kebijakan publik, opini elit politik lebih menentukan kebijakan publik dibandingkan opini publik menentukan kebijakan publik. Hal serupa dikatakan oleh Sabatier⁷ bahwa dalam pembuatan kebijakan didominasi oleh opini elit, sedangkan opini publik lebih sedikit pengaruhnya atau bahkan tidak memiliki pengaruh. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa peran opini elit politik lebih dominan dan lebih berpengaruh dibandingkan peran opini publik dalam pelaksanaan pembuatan kebijakan publik. Anggapan bahwa opini elit lebih mempengaruhi kebijakan publik akan terus

⁵H.Rika, 'Gagal soal HAM, Era Jokowi Juga Dinilai Berwatak Otoriter' <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180319200711-20-284302/gagal-soal-ham-era-jokowi-juga-dinilai-berwatak-otoriter> (6 Agustus 2019)

⁶T.R.Dye, *Op.cit.*, 332.

⁷W.Parsons, *Public Policy-Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan* (Jakarta:KENCANA,2017) 198.

berlanjut apabila publik tidak merasakan manfaat secara langsung dari adanya kebijakan publik, atau opini publik yang seharusnya telah mewakili apa yang diinginkan oleh publik terus dipandang sebelah mata oleh para pembuat kebijakan. Hal ini akan terus membuat publik merasa tidak puas terhadap kebijakan publik yang ditetapkan.

Cara yang dapat dilakukan agar opini publik dipertimbangkan dan tidak dipandang sebelah mata oleh pembuat kebijakan, menetapkan kebijakan sesuai dengan aspirasi publik, dan merubah kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan yang diharapkan publik adalah dengan melakukan *lobbying*. Cara yang bisa dilakukan untuk melakukan *lobbying* salah satunya yaitu membuat petisi⁸.

Menurut Malina, Macintosh, dan E.Davenport⁹, petisi merupakan permintaan formal untuk bertindak kepada otoritas yang lebih tinggi. Artinya, petisi merupakan permintaan formal yang dilakukan dengan membuat dokumen secara tertulis untuk diberikan kepada otoritas yang lebih tinggi agar melakukan tindakan mengenai gugatan atau permintaan yang diberikan oleh pembuat petisi. Dalam pembuatan petisi tertulis tentunya dibutuhkan dukungan publik yang diwujudkan dalam bentuk tandatangan pada dokumen petisi yang diajukan. Tentu dalam pembuatan petisi dibutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mengumpulkan tandatangan dari publik karena publik atau masyarakat yang mendukung petisi berada di tempat tinggal yang menyebar di seluruh kota wilayah Indonesia. Jarak yang ditempuh

⁸ CADCA, *Strategizer 31- Guidelines for Advocacy: Changing Policies and Laws to Create Safer Environments for Youth* (CADCA,2013) 5

⁹ A. Malina, Macintosh, dan E.Davenport, 'E-petitioner: A Monitoring and Evaluation Report' *International Teledemocracy Centre Napier University* (2001) : 18.

untuk mengisi petisi juga berarti beragam, ada yang dekat dan ada juga yang jaraknya sangat jauh. Selain itu, penentuan lokasi pembuatan petisi juga menjadi hal yang harus diperhatikan mengingat petisi membutuhkan dukungan dari banyak pihak sehingga lokasi yang strategis adalah salah satu bagian yang penting untuk dipikirkan dalam proses pembuatan petisi. Hal ini bisa dikatakan sebagai hambatan dalam mewujudkan permohonan petisi kepada otoritas yang lebih tinggi.

Namun, di era modern saat ini, ICT sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia karena mampu mempermudah berbagai kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Salah satunya bisa digunakan untuk membuat petisi *online*. Petisi *online* atau e-petisi berperan sebagai media penghubung antara publik dan pihak yang memiliki otoritas yang menjadi target pada isu di petisi *online*, contohnya seperti pemerintah. Dalam hal ini, publik berupaya menyampaikan permintaan adanya tindakan lanjutan atau gugatan kepada pihak yang memiliki otoritas mengenai isu yang terjadi. Petisi *online* yang memanfaatkan ICT atau *Information and Communication Technologies* menjadi pilihan tepat bagi publik untuk menyampaikan aspirasi atau opini. Hal ini dikarenakan petisi *online* lebih mudah/praktis digunakan publik, tidak membutuhkan waktu yang lama, dan petisi *online* juga bisa dilakukan walaupun tidak berada di satu tempat pada waktu tertentu untuk mengumpulkan dukungan. Menurut A. Malina, Macintosh, dan E.Davenport¹⁰, petisi dengan memanfaatkan ICT, petisi online atau *e-petition* mempermudah akses dan lebih efisien untuk diperluas peredaran gagasannya, komunikasi tanpa tatap muka, tidak bergantung

¹⁰ *Loc.cit.*

pada kehadiran, dan merupakan kebangkitan ruang publik. Artinya, petisi *online* yang memanfaatkan ICT mampu membuat publik berpartisipasi dengan lebih mudah dan efisien untuk memberikan dukungan, isu pada petisi *online* juga bisa diketahui lebih banyak orang sehingga lebih mudah mencari dukungan publik, komunikasi dalam pelaksanaan petisi *online* juga tidak perlu menggunakan komunikasi tatap muka semua orang yang berpartisipasi memberikan dukungan, pelaksanaan petisi *online* tidak bergantung kepada kehadiran semua pendukung yang memberikan tanda tangan karena tanda tangan sudah terdata pada petisi *online*. Akhirnya, seperti yang dikatakan oleh Thomson dalam A. Malina, Macintosh, dan E.Davenport¹¹ bahwa petisi *online* yang memanfaatkan ICT mampu membangkitkan ruang publik, yaitu sebuah forum komunikasi ideal bagi publik untuk mengekspresikan berbagai ide tentang isu-isu yang menjadi perhatian publik.

ICT erat hubungannya dengan penggunaan internet. Dalam *website* Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia¹² menunjukkan bahwa proyeksi pengguna internet di Indonesia, yaitu :

¹¹ *Ibid*, 11.

¹²W.Hidayat, 'Pengguna Internet Indonesia Nomor Enam di Dunia' https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4286/Pengguna+Internet+Indonesia+Nomor+Enam+Dunia/0/sorotan_media (7 Agustus 2019)

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Pengguna Internet di Indonesia Tahun 2012-2019

Tahun	Jumlah Penduduk Pengguna Internet
2012	-
2013	72,8 juta jiwa
2014	83,7 juta jiwa
2015	93,4 juta jiwa
2016	102,8 juta jiwa
2017	112,6 juta jiwa
2018	123 juta jiwa
2019	-

Sumber : kominfo

Berdasarkan data di atas, jumlah penduduk yang menggunakan internet di Indonesia pada tahun dari tahun 2013 hingga tahun 2018 akan terus mengalami peningkatan. Artinya, internet sudah dianggap penting oleh penduduk Indonesia karena mayoritas penduduk telah menggunakan internet.

Banyaknya publik yang menggunakan internet membuat peluang tercapainya tujuan petisi *online* dalam mendapatkan dukungan publik terhadap suatu isu menjadi lebih besar dan lebih efektif. Proses penyerahan petisi kepada pihak otoritas yang menjadi target pun akan lebih cepat. Hal tersebut semakin memperbesar kemungkinan untuk merubah kebijakan melalui petisi *online*.

Keberhasilan petisi *online* dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah bisa dibuktikan dengan beberapa kemenangan yang telah didapatkan. Salah satu petisi

online yang telah membuktikan pengaruh pada pembuatan kebijakan adalah Change.Org.

Change.Org adalah *platform* terbuka dalam bentuk situs web yang berguna untuk membuat petisi *online*. Change.Org menampung petisi dari publik untuk melakukan perubahan sosial mengenai isu sosial yang ada dan membantu pembuat petisi untuk mendapatkan dukungan publik berupa tanda tangan.

Keberhasilan pertama Change.Org, yaitu petisi mengenai kamera CCTV terpasang di toilet siswa yang dimulai oleh Wahyu Nur Pratama berisi tentang permohonan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan pencabutan kamera CCTV di toilet siswa SMAN 100 Jakarta. Petisi ini berhasil mendapatkan dukungan publik dengan terkumpulnya 528 tanda tangan dari target 1.000 tanda tangan.¹³ Keberhasilan petisi ini dibuktikan dengan adanya respon dari Gubernur DKI Jakarta dan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang berhasil memanggil pihak sekolah karena melakukan pelanggaran pemasangan CCTV di Toilet Siswa. Akhirnya, pihak sekolah mencopot kamera CCTV di Toilet Siswa SMAN 100 Jakarta.¹⁴ Dalam kasus ini, pelanggaran HAM yang terjadi adalah hak atas rasa aman karena privasi siswa merasa terancam dengan adanya kamera CCTV di toilet.

¹³W.N Pratama, 'Copot Kamera CCTV di Toilet Siswa Sekolah Kami' <https://www.change.org/p/aniesbaswedan-cctv-di-toilet-siswa-melanggar-privasi-smanseratus-erlinda-kpai> (7 Agustus 2019)

¹⁴W.N Pratama, 'Kemenangan! Kamera CCTV di Toilet Siswa SMA Negeri 100 Jakarta Telah Dicapot', di akses pada <https://www.change.org/p/aniesbaswedan-cctv-di-toilet-siswa-melanggar-privasi-smanseratus-erlinda-kpai/u/15273474> (7 Agustus 2019)

Keberhasilan kedua, yaitu petisi mengenai “Bebaskan Yusniar dan Proses Hukum Sudirman Sijaya” yang dimulai oleh KOPIDEMO Bebas Yusniar berisi mengenai seorang ibu rumah tangga bernama Yusniar yang mendapatkan tindakan premanisme dari salah satu anggota DPR RI karena status di media sosial Yusniar yang dianggap menyinggung Sudirman Sijaya. Dengan petisi ini, diharapkan agar Yusniar mendapatkan penangguhan penahanan, dibebaskan dari tuntutan hukum, mendesak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan untuk mempercepat proses hukum kepada Sudirman, memberhentikan Sudirman sebagai anggota DPRD Jeneponto dan anggota Partai Gerindra, mencabut pasal 27 ayat (3) UU ITE, dan mendesak Sudirman untuk mengganti rugi baik secara material dan immaterial kepada Yusniar beserta keluarganya. Petisi ini berhasil mendapatkan dukungan publik dengan terkumpulnya 6.541 tanda tangan dari target 7.500 target tanda tangan¹⁵. Keberhasilan petisi dibuktikan dengan dibebaskannya Yusniar dari jerat kriminalitas, dan terbuktinya UU ITE yang bermasalah¹⁶. Dalam kasus ini, pelanggaran HAM yang terjadi adalah hak atas rasa aman karena adanya tindakan premanisme dari seorang pejabat negara.

Keberhasilan ketiga, yaitu petisi mengenai “Selamatkan Prof Bambang Hero Saharjo” . Petisi ini dimulai oleh Boenk Aldoe berisi tentang permohonan untuk menyelamatkan Bapak Bambang Hero selaku saksi ahli untuk menghitung kerugian

¹⁵KOPIDEMO, ‘Bebaskan Yusniar dan Proses Hukum Sudirman Sijaya’ <https://www.change.org/p/pengadilan-negeri-makassar-bebas-yusniar-dan-adili-sudirman-sijaya> (7 Agustus 2019)

¹⁶H.Basri. ‘Yusniar Bebas dari Jerat Kriminalitas, Bukti UU ITE bermasalah’ <https://makassar.tribunnews.com/2017/04/12/yusniar-bebas-dari-jerat-kriminalisasi-bukti-uu-ite-bermasalah> (7 Agustus 2019)

negara akibat adanya kebakaran hutan yang disebabkan oleh perusahaan PT Jatim Perkasa yang justru digugat dan dihukum denda Rp 1 Miliar oleh Pengadilan Negeri Cibinong. Petisi ini berhasil mendapatkan dukungan publik dengan terkumpulnya 160.490 tanda tangan dari target 200.000 tanda tangan¹⁷. Keberhasilan ini dibuktikan dengan bebasnya Prof Bambang dari tuntutan PT Jatim Jaya Perkasa¹⁸. Dalam kasus ini, pelanggaran HAM yang terjadi adalah hak untuk mendapatkan keadilan. Sebab, Bapak Bambang yang menjalankan tugas untuk mengetahui kerugian negara akibat kebakaran hutan yang di sebabkan perusahaan tersebut justru digugat, dan ini merupakan suatu ketidakadilan yang dirasakan oleh Bapak Bambang.

Di Indonesia pelaksanaan petisi *online* telah berhasil melakukan beberapa perubahan, khususnya dalam perubahan keputusan. Change.Org sebagai *platform* petisi *online* telah berhasil mendapatkan kemenangan dari petisi yang dibuat, serta mendapatkan banyak dukungan dari publik untuk membantu mewujudkan perubahan keputusan yang ditetapkan. Pada tahun 2012-2019 sudah tercipta 60 petisi kemenangan yang berhasil didapatkan yang ditujukan untuk masyarakat Indonesia¹⁹. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang keberhasilan petisi *online* dalam mewujudkan perubahan keputusan. Penelitian ini

¹⁷B. Aldoe, 'Selamatkan Prof Bambang Hero Saharjo' <https://www.change.org/p/selamatkan-pejuang-lingkungan-bambang-hero-saveourhero-pengadilannegericibinong> (7 Agustus 2019)

¹⁸P.R Astyawan, 'Gugatan Dicabut, Guru Besar IPB Bebas dari gugatan Rp 510 Miliar' <https://news.okezone.com/read/2018/10/24/338/1968590/gugatan-dicabut-guru-besar-ipb-bebas-dari-gugatan-rp510-miliar> (7 Agustus 2019)

¹⁹ Change.Org, <https://www.change.org/petitions?selected=victories> (16 Februari 2020)

dilakukan pada 60 petisi kemenangan sebagai objek penelitian yang akan dianalisa berdasarkan 5 indikator keberhasilan petisi *online*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, argumentasi bahwa petisi *online* mampu merubah kebijakan telah terindikasi dengan adanya bukti yang menunjukkan petisi *online* telah merubah keputusan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah untuk membuktikan :

Apakah petisi *online* berhasil merubah keputusan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa keberhasilan petisi *online* dalam merubah keputusan

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan petisi *online* agar perubahan keputusan berhasil dilakukan. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan dijadikan acuan untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi kepada masyarakat untuk menyampaikan opini terhadap permasalahan yang terjadi guna mewujudkan perubahan keputusan dengan memanfaatkan petisi *online* .

1.5 Sistematika Penulisan

- **BAB 1 PENDAHULUAN**, menjelaskan mengenai Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penelitian.
- **BAB 2 KAJIAN PUSTAKA**, menjelaskan mengenai Definisi Kebijakan, Petisi *Online*, Konsep Keberhasilan Petisi *Online*.
- **BAB 3 METODE PENELITIAN**, menjelaskan mengenai Tipe Penelitian, Lokasi Penelitian, Operasional Variabel, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, Validitas Data
- **BAB 4 PROFIL PENELITIAN**, menjelaskan mengenai Profil Change.Org, Cara Menggunakan Change.Org, Petisi *Online* tentang *Public Affairs*
- **BAB 5 TEMUAN PENELITIAN**, menguraikan hasil temuan penelitian terkait dengan indikator keberhasilan petisi *online*, yaitu (1) Isu yang dipetisikan mendesak dan tidak bertentangan dengan opini publik, (2) Diketahui oleh masyarakat luas, (3) Menyajikan fakta yang kredibel, (4) Petisi tidak menuntut terlalu banyak perubahan, (5) Kuantitas dukungan tinggi.

- **BAB 6 ANALISA**, menjelaskan analisa keberhasilan petisi *online* dalam merubah keputusan menggunakan indikator, yaitu : (1) Isu yang dipetisikan mendesak dan tidak bertentangan dengan opini publik, (2) Diketahui oleh masyarakat luas, (3) Menyajikan fakta yang kredibel, (4) Petisi tidak menuntut terlalu banyak perubahan, (5) Kuantitas dukungan tinggi.
- **BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN**, menjelaskan kesimpulan dan hasil analisa berdasarkan pada data temuan, dan saran yang diberikan oleh peneliti untuk penelitian lebih lanjut mengenai keberhasilan petisi *online* dalam merubah keputusan.